



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Perwira No. 184 Belakang Balok Telepon/Fax (0752) 8100835

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 188.45/052/DP3APPKB/XII/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-106-2017 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-226-2017.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

KEEMPAT : akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI,**



**TATI YASMARNI, SE.MM  
NIP. 19630629 198302 2 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
6. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Bukittinggi.  
Nomor : 188.45/052/DP3APPKB/XII/ 2017  
Tanggal : 29 Desember 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Proporsi Penduduk angkatan kerja dibagi dengan Penduduk usia kerja.	BPS	54,00%	54,63%	55,00%	55,63%	56,00%	56,63%
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	Jumlah Perempuan korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif dibagi dengan jumlah perempuan korban kekerasan x 100	Dinas P3APPKB	54,00%	54,63%	55,00%	55,63%	56,00%	56,63%
		Indeks Kualitas Keluarga.	$R - IKK = \frac{\sum b_{ixi}}{\sum b_i}$	Dinas P3APPKB					65,76	65,76
		Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).							Utama	Utama
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Indikator Kota Layak anak	Kementerian PPPA		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah Anak korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif dibagi dengan jumlah anak korban kekerasan x 100	Dinas P3APPKB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terkendalnya Jumlah Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur di kali 100	Dinas P3APPKB	65	65	65,2	65,4	65,6	66

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rates /ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Dinas P3APPKB	98	96	94	92	90	89
4	Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR=5 \times \sum ASFR / (1.000 \text{ Pr})$	Dinas P3APPKB					1,52	1,52

Diketahui Oleh :

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS,SH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA



TATI YASMARNI, SE.MM  
NIP.19630629 198302 2 001